

Tidak Pro Rakyat, Rafli Minta Presiden Jokowi Cabut Kebijakan Kenaikan Harga BBM

Updates. - [PUBLIKRIAU.COM](https://publikriau.com)

Sep 3, 2022 - 18:43



Anggota Komisi VI DPR RI Rafli

JAKARTA - Anggota Komisi VI [DPR RI Rafli](https://publikriau.com) menanggapi keputusan Pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis subsidi, Pertalite dan Solar. Ia meminta kebijakan kenaikan harga [BBM](https://publikriau.com) yang diumumkan oleh Presiden RI [Joko Widodo](https://publikriau.com) pada Sabtu (3/9/2022) dicabut karena tidak pro rakyat.

"Kita dari awal tegas menolak kenaikan harga [BBM](#), karena tidak pro rakyat. Bahkan melalui rapat paripurna. Kita harap kebijakan ini di cabut. Karena kalau tidak berarti ada yang salah dalam mengelola Negara ini khususnya terkait [BBM](#)," kata Rafli pada keterangan persnya, Sabtu (3/9/2022).

Penyesuaian harga [BBM](#) terbaru yang telah diumumkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif yakni, harga Peralite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Kemudian, harga Solar subsidi dari Rp5.150 per liter kini menjadi Rp6.800 per liter. Sedangkan harga Pertamina dari Rp12.500 naik menjadi Rp14.500 per liter.

"Kenaikan harga [BBM](#) yang berlaku mulai siang ini, tidak tepat. Mengingat kondisi masyarakat baru juga bangkit dari terpuruknya ekonomi setelah pandemi. Apalagi dengan iming-iming kompensasi berupa BLT sebesar Rp150.000 perbulan bagi masyarakat selama 4 bulan. Tentu hal ini kita tentang," ujar politisi [PKS](#) itu.

Legislator dapil Nanggroe [Aceh](#) Darussalam I itu menilai kenaikan harga [BBM](#) ini keliru, lantaran ini terjadi di tengah turunnya minyak mentah dunia yakni senilai sekitar 30 dollar per barel. Harga BBM di negara tetangga seperti Malaysia pun lebih murah dibandingkan dengan harga di Indonesia. Belum lagi, dampak kenaikan [BBM](#) ini juga akan membuat harga barang naik terutama bahan pokok.

Sehingga kebijakan ini akan membuat dampak kesengsaraan terhadap rakyat kecil dan menengah seperti buruh, supir angkutan umum, ojek online, dan lainnya. "Jika Pemerintah belum bisa buat rakyat bahagia, maka tidak usah juga menambah beban yang menyengsarakan rakyat dengan kebijakan menaikkan harga [BBM](#) seperti ini," tegas [Rafli](#). (gal/sf)